

# **BAB I PENDAHULUAN**

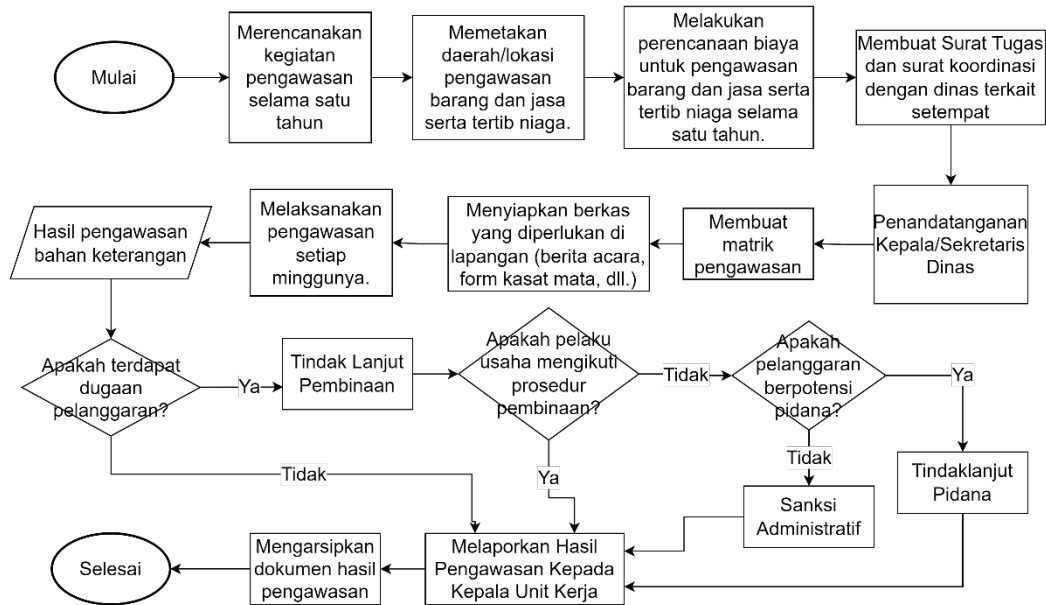
## **I.1. Latar Belakang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang menjadi mitra kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Disperindag membawahi segala aktivitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah atau provinsi, khususnya pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Disperindag Pemprov Jabar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 4 bidang serta 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Salah satu di antara ke empat bidang tersebut yang bertugas di bidang perdagangan adalah Bidang Perlindungan Konsumen (Bidang PK) (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023).

Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tiga orang kepala seksi, yaitu Seksi Pengawasan, Seksi Pemberdayaan Konsumen, dan Seksi Tertib Niaga dengan total pegawai pada Bidang Perlindungan Konsumen yaitu sebanyak 23 orang. Salah satu dari tugas yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan adalah pengawasan barang beredar dan atau jasa pada daerah Jawa Barat, dimana tugas ini diberlakukan atas dasar hukum undang-undang yang telah ditetapkan untuk dapat menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen dalam menggunakan barang-barang yang beredar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023). Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa ini dilakukan dengan 3 jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Berkala, dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan atau jasa yang diawasi dengan terencana sesuai program dan kriteria.
2. Pengawasan Terpadu, dilaksanakan berdasarkan program dan atau adanya permasalahan barang beredar dan atau jasa yang memerlukan penanganan.
3. Pengawasan Khusus, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan aduan dari masyarakat, LPKSM, pelaku usaha/asosiasi, informasi melalui media cetak, elektronik, dan lainnya.

Kegiatan yang secara rutin selalu dilakukan oleh Bidang Perlindungan Konsumen adalah Pengawasan Berkala yang dilakukan setiap minggu dengan alur proses yang ditampilkan pada Gambar 0.1.



Gambar 0.1 Alur Pengawasan Berkala

Pada Gambar 0.1 dijelaskan mengenai alur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pengawasan Berkala diawali dengan merencanakan pengawasan dengan memetakan produk yang akan diawasi selama satu tahun ke depan dan memetakan daerah atau lokasi pengawasan dengan parameter menentukan pelaku usaha yang diawasi yaitu pelaku usaha yang tidak pernah dilakukan pengawasan selama dua tahun terakhir serta daerah atau pelaku usaha yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran.

Setelah dilakukan perencanaan pengawasan, petugas pengawas mulai menjalankan perencanaan tersebut. Dalam pelaksanaannya Bidang Perlindungan Konsumen akan melakukan pengawasan dua hingga enam kali setiap minggunya pada daerah serta pelaku usaha yang berbeda-beda dengan setiap daerahnya terdiri dari satu tim pengawasan yang beranggotakan empat orang. Pada hari pelaksanaan pengawasan, dilakukan persiapan berkas yang diperlukan pada saat di lapangan seperti alat tulis & kertas, berkas berita acara, formulir kasat mata, dan lain-lain.

Pada saat pelaksanaan pengawasan telah selesai dilakukan, apabila terdapat dugaan pelanggaran, maka dilakukanlah proses tindak lanjut administratif dimana Bidang Perlindungan Konsumen dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan menempatkan garis pembatas dan atau stiker yang menandakan bahwa barang tersebut merupakan “barang dalam pengawasan” pada barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut. Setelahnya maka dilakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha dan distributor/produsen dari barang yang tidak sesuai ketentuan tersebut untuk dilakukan klarifikasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Apabila pemanggilan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dan distributor/produsen terkait maka akan diberikan surat peringatan. Pemanggilan serta surat peringatan tersebut untuk memberikan perintah larangan menjual dan mengedarkan barang yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Apabila barang masih ditemukan dijual dan diedarkan maka pelaku usaha serta distributor/produsen tersebut akan mendapatkan sanksi.

Terdapat dua jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif akan diberikan kepada pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran regulasi yang bersifat administratif seperti pelanggaran perizinan, pelanggaran standar produk, pelanggaran ketentuan *labeling* dan iklan, dan pelanggaran lingkungan (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan). Sanksi pidana akan diberikan kepada pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran yang lebih serius atau berdampak besar terhadap masyarakat seperti penipuan konsumen, peredaran barang berbahaya, pemalsuan produk, dan pelanggaran berat terhadap lingkungan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Tahap akhir dalam pelaksanaan pengawasan berkala yaitu mencatat hasil pengawasan ke dalam *database* Bidang Perlindungan Konsumen. Hasil pengawasan tersebut digunakan untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan seperti Kepala Bidang, Sekretaris Dinas, atau Kepala Dinas. Dan data hasil pengawasan tersebut juga digunakan sebagai data acuan perencanaan pelaksanaan pengawasan pada periode berikutnya.

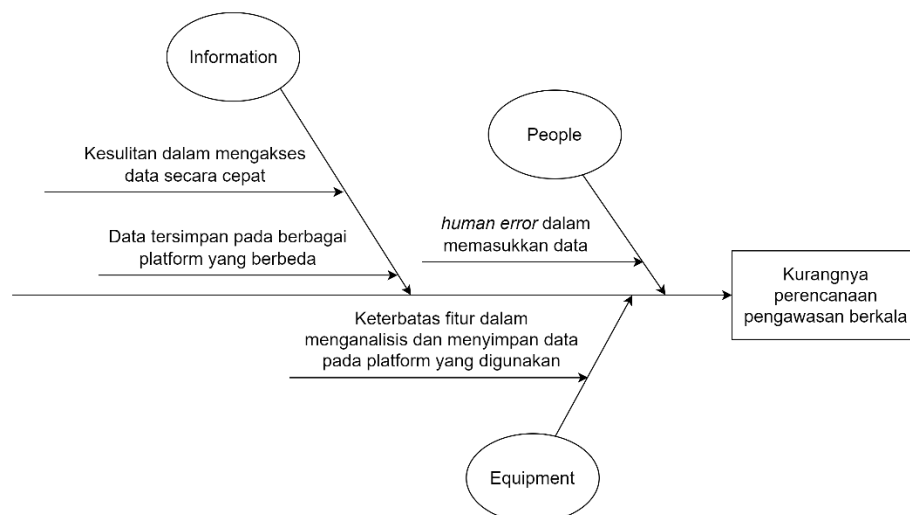
Perencanaan yang dirancang Bidang Perlindungan Konsumen memegang peranan penting dalam menjaga serta memantau kinerja Bidang Perlindungan Konsumen dalam melakukan tugas pengawasan berkala kepada 27 kota/kabupaten pada Provinsi Jawa Barat (terdiri dari sembilan kota dan 18 kabupaten). Akan tetapi, dalam melakukan pengawasan berkala tersebut, Disperindag Jabar Bidang Perlindungan Konsumen masih menggunakan sistem informasi berupa Google Spreadsheet dan Microsoft Excel. Data-data yang dikumpulkan untuk perencanaan serta pelaporan hasil pengawasan masih tersimpan pada tempat atau *file* yang berbeda-beda sehingga Bidang Perlindungan Konsumen memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data-data tersebut sehingga dapat membantu operasional pengawasan berkala dari mulai perencanaan hingga pencatatan hasil pengawasan. Keterbatasan sistem informasi *existing* dalam menganalisis data juga menjadi kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penggunaan sistem informasi seperti Microsoft Excel banyak digunakan pada beberapa proses bisnis yang memerlukan penyimpanan dan analisis data. Kemudahan yang ditawarkan menjadikan sistem informasi ini diandalkan oleh beberapa instansi dan perusahaan. Akan tetapi penggunaan Microsoft Excel memiliki limitasi dan juga kekurangan pada fitur yang dimilikinya terutama pada proses yang menyimpan dan memproses banyak data di dalamnya. Microsoft Excel secara teknis memiliki batasan dapat menangani sekitar 17 miliar sel terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mungkin dicapai dikarenakan limitasi data tersebut mengandalkan memori komputer yang menjalankan aplikasi Microsoft Excel tersebut, semakin banyak data yang disimpan dan diolah maka semakin banyak pula memori yang digunakan yang akan memperlambat proses aplikasi (Whitehead, 2023).

Beberapa batasan dan kekurangan lainnya juga disebutkan seperti sulitnya melacak *error* atau kesalahan data, fitur kolaborasi yang tidak stabil, keterbatasan jenis *file* yang disimpan, dan berbagai permasalahan dan batasan lainnya (Whitehead, 2023), (Silipo, 2020).

Solusi dari batasan-batasan tersebut mengarah kepada sistem informasi tingkat lanjut yang dapat disesuaikan dengan proses bisnis yang memerlukan sistem yang lebih relevan dan melampaui batasan-batasan tersebut. Salah satu sistem informasi tingkat lanjut yang dapat diterapkan adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) dimana SIM merupakan penggabungan dari sumber daya manusia dan sumber daya berbasis komputer yang menghasilkan koleksi penyimpanan data, komunikasi, dan penggunaan untuk operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis (Santoso dkk., 2022). Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Santoso dkk. (2022), dengan pendekatan *bibliometric* didapatkan bahwa dari keempat aspek kualitas sebuah sistem manajemen informasi (*collecting, analyzing, storing, dan presenting*), *analyzing* mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yang menjadikan kualitas dari suatu sistem manajemen informasi adalah memudahkan untuk menganalisis dan menyajikan informasi.

Berkaitan dengan permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengawasan berkala menjadikan rancangan sistem manajemen informasi merupakan solusi permasalahan yang tepat dan dapat diandalkan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data. Pada Gambar 0.2 ditampilkan *fishbone* permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perlindungan Konsumen.



Gambar 0.2 Diagram *Fishbone* Pengawasan Berkala

Diagram *fishbone* pada Gambar 0.2 merupakan identifikasi akar permasalahan yang terdapat dalam alur proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berkala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Jabar. Berdasarkan hasil identifikasi akar permasalahan pada diagram *fishbone*, beberapa potensi solusi pada Tabel 0.1 telah diajukan untuk mengatasi masing-masing akar permasalahan.

Tabel 0.1 Potensi Solusi Akar Permasalahan

| No. | Akar Permasalahan   | Potensi Solusi   |
|-----|---|--|
| 1   | Keterbatas fitur dalam menganalisis dan menyimpan data pada platform yang digunakan | Rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala. |
| 2   | Kesulitan dalam mengakses data secara cepat   |  |
| 3   | Data tersimpan pada berbagai platform yang berbeda                                  |  |
| 4   | <i>human error</i> dalam memasukkan data  |  |

Pada Tabel 0.1 solusi utama dalam mengatasi akar permasalahan adalah rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala. Rancangan sistem tersebut dapat menghasilkan analisis dari data yang dikumpulkan untuk dapat mendukung keputusan pengguna dalam melakukan perencanaan pengawasan berkala.

Tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan memastikan setiap proses Pengawasan Berkala yang dilakukan Bidang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang dirancang. Rancangan sistem ini ditujukan khususnya untuk Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Bidang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana proses bisnis usulan dari rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala?

## **I.3. Tujuan**

Tujuan untuk penelitian ini adalah:

1. Merancang sistem informasi manajemen pengawasan berkala untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Bidang Perlindungan Konsumen.
2. Merancang proses bisnis usulan terkait implementasi rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Bidang Perlindungan Konsumen.

#### **I.4. Manfaat**

Adapun manfaat dari rancangan sistem informasi manajemen pada kegiatan pengawasan berkala adalah sebagai berikut.

- A. Bagi Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat:
  1. Menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan pengawasan berkala pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
  2. Menampilkan analisis terkait pengawasan berkala untuk membantu menentukan sebuah keputusan.
  3. Menyimpan data hasil pengawasan dengan berbagai tipe data dengan mudah, cepat, dan praktis.
- B. Bagi Petugas Pengawas:
  1. Membantu petugas pengawas dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan data.
  2. Membantu petugas pengawas dalam melakukan pencarian dan pelacakan data hasil pengawasan.
- C. Bagi Pegawai Struktural Inti:
  1. Membantu pegawai struktural inti dalam menampilkan analisis terkait pengawasan berkala untuk membantu menentukan sebuah keputusan.
- D. Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Jawa Barat:
  1. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari penggunaan barang beredar yang tidak sesuai standar.
  2. Menertibkan pelaku usaha agar memperjualbelikan barang yang aman untuk konsumen.

E. Bagi mahasiswa:

1. Memahami secara mendalam proses bisnis pengawasan berkala pada Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
2. Memiliki pengalaman dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pada kondisi yang nyata serta menghasilkan rancangan solusi terhadap permasalahan pada Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Bidang Perlindungan Konsumen khususnya pada kegiatan Pengawasan Berkala. Dan dari latar belakang didapatkan *fishbone* permasalahan untuk menentukan rumusan masalah, tujuan yang dicapai, dan manfaat yang bisa didapatkan oleh setiap *stakeholder*.

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan studi literatur yang relevan dengan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu *Rapid Application Development* (RAD) dan *Unified Modelling Language* (UML). Bab ini juga membandingkan metode-metode yang digunakan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap metode perancangan yang tersedia seperti *Extreme Programming* dan *Scrum*.

### **BAB III            METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH**

Bab ini memuat sistematika pemecahan masalah yang dilakukan tugas akhir dari mulai tahap identifikasi permasalahan hingga solusi permasalahan disesuaikan dengan metode yang digunakan yaitu *Rapid Application Development* (RAD) dalam melakukan rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala



terhadap Bidang Perlindungan Konsumen. Sistem terintegrasi juga ditentukan pada bab ini untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang terintegrasi ke dalam sistem. Batasan dan asumsi tugas akhir juga diberikan untuk memberikan fokus dan cakupan terhadap permasalahan yang diselesaikan yaitu rancangan sistem informasi manajemen pengawasan berkala hanya dirancang untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

#### **BAB IV            PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian proses perancangan sistem dengan mengikuti struktur metode perancangan yang digunakan yaitu *Rapid Application Development (RAD)* dimulai dari proses pengumpulan dan pengolahan data dengan cara melakukan wawancara terhadap *stakeholder* dan mengelola data hasil wawancara serta data yang diperoleh untuk menjadi acuan penyelesaian masalah. Kemudian masuk ke tahap *requirement planning* untuk melakukan identifikasi proses bisnis, *stakeholder*, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan sistem. Kemudian masuk ke tahap *data modelling* untuk melakukan perancangan basis data menggunakan *Unified Modeling Language (use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram)*. Kemudian masuk ke tahap *user design* dan *construction* dengan membuat *mockup* sistem dan mengembangkan aplikasi menggunakan *Flask* sebagai alat pengembang rancangan sistem. Dan kemudian masuk ke tahap *cutover* dengan melakukan pengujian terhadap hasil rancangan sistem dengan menggunakan *black box testing* dan *User Acceptance Testing (UAT)*.

#### **BAB V            ANALISIS**

Bab ini memuat analisis hasil rancangan sistem, dimulai dari analisis proses bisnis usulan yang menggunakan rancangan sistem, analisis perbandingan kondisi saat ini dan usulan, analisis kelebihan dan kekurangan sistem, dan analisis rekomendasi pengembangan sistem

berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan pada sistem. Analisis yang disajikan pada bab ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait penyelesaian masalah berdasarkan hasil rancangan sistem yang telah dibuat.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari tugas akhir yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan saran bagi peneliti selanjutnya berdasarkan analisis rekomendasi pengembangan sistem yang didapatkan pada bab sebelumnya.